

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab penutup atau bab yang terakhir ini, saya ingin menyimpulkan yang berisikan hasil-hasil yang dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan, adapun posisi penulis dalam skripsi ini hanya menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas fenomena yang terjadi dengan apa adanya karena sesuai dengan metode dan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan merangkai kenyataan menjadi suatu cerita (narasi), yang menguraikan secara teratur suatu masalah keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya bukan bagaimana seharusnya, adapun yang dapat saya simpulkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Muhammadiyah dikenal luas sebagai gerakan pembaharuan atau gerakan tajdid fil-Islam. Pembaharuan Muhammadiyah berangkat dari gagasan dasar *al-ruju ila al-Qur'an wa al-Sunnah*, yakni gerakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Langkahnya pemurnian Islam untuk menemukan ajaran yang otentik, sekaligus melahirkan Islam yang berkemajuan. Selain itu Pembaharuannya diwujudkan dalam mendobrak kebekuan berpikir umat dengan membangun pemahaman Islam yang berkemajuan. Sebagai gerakan yang bermuara pada modernisme atau

reformisme Islam tentunya Muhammadiyah akan berupaya merespon terhadap informasi-informasi yang diterima dan kemudian ditentukan dengan sikap organisasi terhadap informasi tersebut.

2. Muhammadiyah dalam menyeleksi informasi terkait neoliberalisme. Muhammadiyah bisa mendapatkan informasi dengan mudah baik dari media cetak maupun media elektronik. Muhammadiyah akan dengan sigap menyeleksi informasi-informasi terkait neoliberalisme dengan tujuan nantinya dapat memberikan keterangan dan mengkritisi kepada pemerintah.
3. Muhammadiyah dalam mengatur arus informasi terkait neoliberalisme. Karena Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, maka cara pengaturan arus informasi terkait neoliberalisme dengan mengkomunikasikan berbagai persoalan neoliberalisme kepada jaringan organisasi Muhammadiyah sampai tingkat bawah. Dari situlah maka dengan segera akan diadakan mekanisme pertemuan, acara, bahkan ada permusyawaratan, ataupun bisa juga dengan memanfaatkan media Muhammadiyah seperti Suara Muhammadiyah, Majalah Kampus dan media-media lainnya.
4. Muhammadiyah dalam interpretasi arus informasi terkait neoliberalisme. Setelah Muhammadiyah menyeleksi dan mengatur informasi maka

langkah selanjutnya Muhammadiyah akan menginterpretasikan persoalan neoliberalisme tersebut. Dalam hal ini Muhammadiyah mencoba membandingkan dengan kondisi keindonesiaan saat ini, dan ternyata jauh berbeda pengharapan Indonesia ke depan adalah Ekonomi kerakyatan, sedangkan kenyataan berbanding terbalik yaitu Ekonomi liberal yang diterapkan sehingga Muhammadiyah memberikan sikap tentang neoliberalisme baik di dunia maupun di Indonesia, dan Muhammadiyah memberikan kritikan-kritikan kepada kebijakan kepada yang telah dibuat pemerintah Indonesia, sehingga yang dicita-citakan tentang ekonomi kerakyatan dapat terwujud, yang juga terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3.

5. Respon Muhammadiyah terhadap neoliberalisme pada masa KIB II yaitu Muhammadiyah menganggap KIB II itu neoliberalisme, kental sekali dan warnanya jelas dan tidak terbantahkan, berbicara tidak padahal perilakunya dan faktanya jelas sangat berdampak, dan secara tegas rezim KIB dalam dua periode ini lebih merepresentasikan rezim yang neoliberalisme ini dan sangat tampak sekali. Hal ini terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Karena itu bagi Muhammadiyah neoliberalisme dalam suatu arus besar kapitalisme global dan ekonomi global itu memiliki problem, sehingga perlu kritik perlu proses membangun yang tidak merusak.

## **B. Saran**

Efektif tidaknya suatu konsep persepsi politik terhadap Neoliberalisme KIB II tergantung bagaimana mereka mencoba mengkritisi, memberikan solusi yang tentunya disertai dengan strategi-strategi dalam lapangan untuk menghadapi paham neoliberalisme tersebut. Tentunya hal ini sangat sulit melihat Muhammadiyah tidak berada dalam posisi penting dalam pengambilan keputusan publik sehingga Muhammadiyah tidak mampu mengubah kebijakan-kebijakan yang ada dan yang sudah diterapkan Pemerintahan KIB II.

Maka untuk dapat mewujudkan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD pasal 33 ayat 2 dan 3, maka Muhammadiyah mampu melakukan upaya-upaya menghadapi neoliberalisme, akan tetapi sebelum melakukan strategi dan taktik perlawanan tentu Muhammadiyah itu sendiri tidak boleh terjebak dalam arus atau masuk ke dalam neoliberalisme itu sendiri. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi harus secara lebih kontinyu dilakukan oleh Muhammadiyah, sehingga akan terbentuk sebuah konsepsi tentang apa itu neoliberalisme. Muhammadiyah yang dikenal luas sebagai gerakan pembaharuan atau gerakan tajdid fil-Islam harus mampu menjadi basis legitimasi untuk mengkampanyekan neoliberalisme tersebut. Sosialisasi ini juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan media massa sebagai lawan dari neoliberalisme.

2. Muhammadiyah harus melakukan tuntutan akan kembalinya fungsi negara sebagai penyedia layanan publik yang murah sekaligus bermutu dan berpihak kepada kerakyatan.
3. Muhammadiyah seharusnya masuk kedalam pejabat publik negara sehingga Muhammadiyah mampu mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan yang berpusat pada ekonomi kerakyatan bukan ekonomi pasar bebas.